

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam bidang akademik dan riset, kajian pustaka umumnya merujuk pada proses meninjau atau mengkaji berbagai referensi, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber lain yang berkaitan dengan subjek atau isu yang sedang dipelajari. Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh data terkini dan tepat mengenai topik yang akan diteliti. Adapun tujuannya adalah untuk memperdalam wawasan tentang pengetahuan terkini pada bidang tersebut, memantau perkembangan yang sudah berlangsung, serta mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan pengetahuan yang bisa diatasi melalui penelitian lanjutan.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu strategi peneliti untuk mencari pembandingan dalam sebuah studi. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dapat mendukung peneliti dalam menentukan posisi serta menegaskan keaslian suatu penelitian. Selain itu, tinjauan tersebut juga mampu memberikan ide-ide segar kepada peneliti.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Aryani, L. (2024)	Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui	Evaluasi Kebijakan	Kualitatif	Studi Kasus	Analisis Deskriptif

		program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)				
2.	Hendrawan, M. Y., & Harahap, M. I. (2023)	Peran Bidang Perumahan dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang	Administrasi Publik	Kualitatif	Studi Kasus	Analisis Tematik
3.	Nagayoso, R. P., Sadhana, K., & Fristin, Y. (2025)	Program implementasi kebijakan penanggulangan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Studi Kasus	Analisis Isi

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2024) berjudul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia) bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan kondisi hunian masyarakat dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan ekstrem, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar pihak. Persamaan dengan

penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap program perumahan bagi masyarakat miskin serta penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada lokus penelitian, di mana penelitian Aryani berfokus pada Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Desa Nagrak. Selain itu, penelitian Aryani lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan dalam konteks kemiskinan ekstrem, sementara penelitian saya mengkaji efektivitas implementasi program dari perspektif dimensi implementasi kebijakan.

Penelitian oleh Hendrawan dan Harahap (2023) berjudul Peran Bidang Perumahan dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk menganalisis peran dinas perumahan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas perumahan sangat penting dalam memfasilitasi bantuan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa birokrasi dan keterbatasan anggaran. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran kelembagaan dalam program perumahan serta penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada jenis program yang dikaji, di mana penelitian tersebut berfokus pada BSPS, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program RUTILAHU. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan pada aspek efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Penelitian lain oleh Nagayoso, Sadhana, dan Fristin (2025) berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni bagi

Masyarakat Miskin bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perumahan secara umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila didukung oleh regulasi yang kuat dan partisipasi masyarakat, namun masih menghadapi hambatan eksternal seperti kondisi ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus implementasi kebijakan perumahan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian tersebut bersifat lebih konseptual dan tidak berfokus pada satu lokasi spesifik, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan studi kasus yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa kajian mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni umumnya berfokus pada aspek evaluasi kebijakan, peran kelembagaan, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik menyoroti dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan, terutama terkait bagaimana perbedaan pemahaman antar pelaksana mempengaruhi efektivitas program di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu cenderung belum banyak mengkaji implementasi program secara mendalam pada level desa sebagai unit terdepan pelaksanaan kebijakan. Padahal, pada level inilah interaksi antara kebijakan dan realitas

lapangan terjadi secara langsung, sehingga berpotensi memunculkan berbagai permasalahan implementasi yang tidak terlihat pada level makro.

Terdapat research gap yang jelas, yaitu belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan analisis efektivitas implementasi kebijakan dengan fokus pada dimensi interpretasi di tingkat lokal menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat umum, evaluatif, atau berfokus pada aspek tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena implementasi Program RUTILAHU di Desa Nagrak, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif bagaimana proses implementasi berlangsung, khususnya pada dimensi interpretasi kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal.

2.1.2 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata "*ad*" yang artinya cepat dan "*ministrare*" yang artinya membantu atau melayani. Dengan demikian *administrare* artinya membantu atau melayani dengan cepat. Pengertian administrasi terdiri dari dua kategori yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam pengertian sempit diartikan yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh tata usaha yaitu ketik

mengetik, catat mencatat, tulis menulis, agenda, surat menyurat, dan kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan. Administrasi dalam arti sempit sudah dilakukan oleh manusia sejak manusia ada. Nawawi dalam mendefinisikan administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. Handayani dalam Revidadkk (2021:2) menyatakan administrasi dalam arti sempit meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan (*clerical work*).

Nawawi dalam Revidadkk (2021:3):

“Memberi arti administrasi sebagai proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerja sama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien”.

Gie dalam Revidadkk (2021:3) menyatakan administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Keban dalam Revidadkk (2021:3):

“mengartikan administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik”.

Administrasi publik gabungan dari kata administrasi dan publik. Pada dasarnya ilmu administrasi publik sudah lama ada bersamaan dengan adanya

pemerintahan atau negara. Administrasi publik adalah pelaksana kebijakan publik yang telah ditetapkan legislatif. Keban dalam Revida,dkk (2021:4):

“mendefinisikan administrasi publik adalah bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah”.

Chandler dan Plano dalam Revida,dkk (2021:5) :

”memberi arti administrasi publik sebagai suatu proses di mana sumber daya dan personil publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan rasionalitas tertentu yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasi, penggerakan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan kebijakan publik untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui

tindakan terencana, sistematis, dan terukur. Secara konseptual, Menurut Thomas Dye dalam Suganda,dkk (2025:67):

“kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup baik tindakan nyata maupun keputusan untuk membiarkan suatu persoalan tetap berlangsung”.

Kebijakan publik selalu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, legitimasi kekuasaan, sumber daya negara, dan hasil yang diharapkan. Perumusan kebijakan publik tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui tahapan yang bersifat siklikal dan dinamis. Model yang paling umum digunakan dalam studi administrasi publik adalah *Policy Cycle* yang dikembangkan oleh Howlett et al. dan juga didukung oleh Dunn dalam Suganda,dkk (2025:68). Model ini memetakan proses kebijakan ke dalam lima hingga enam tahapan utama sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Identifikasi masalah (*problem identification*) merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Pada tahap ini, pemerintah, pembuat kebijakan, atau pihak-pihak yang berkepentingan berupaya mengenali dan mendefinisikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat atau negara yang memerlukan intervensi kebijakan. Masalah publik yang diidentifikasi dapat bersifat sosial, ekonomi, lingkungan, politik, hingga persoalan ketidakadilan yang menimbulkan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Identifikasi masalah seringkali berasal dari berbagai sumber, seperti laporan media massa yang mengangkat isu-isu aktual, hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan adanya

kesenjangan atau kegagalan sistem, keluhan dan aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan, hingga tekanan politik dari kelompok kepentingan atau oposisi.

Tidak semua masalah yang muncul di masyarakat secara otomatis akan masuk dalam agenda kebijakan pemerintah. Hanya masalah yang dianggap memiliki dampak luas, menimbulkan keresahan sosial, atau berkaitan langsung dengan prioritas politik tertentu yang biasanya dipertimbangkan lebih serius oleh pembuat kebijakan. Dalam proses ini, penting bagi pemerintah untuk memilah mana masalah yang bersifat mendesak dan mana yang dapat ditunda, serta mengkaji secara objektif penyebab, dampak, dan siapa saja yang terlibat atau terdampak oleh masalah tersebut. Proses identifikasi ini juga melibatkan analisis data, konsultasi publik, dan penelaahan terhadap tren global yang mempengaruhi situasi nasional atau daerah.

2. Penetapan Agenda (*Agenda Setting*)

Penetapan agenda (*agenda setting*) merupakan tahapan lanjutan setelah proses identifikasi masalah dalam siklus kebijakan publik. Pada tahap ini, masalah yang telah diidentifikasi akan diprioritaskan untuk dibahas dan diproses lebih lanjut oleh pemerintah, legislatif, atau lembaga pembuat kebijakan. Tidak semua isu yang muncul otomatis masuk ke dalam agenda kebijakan, sebab pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun kapasitas kelembagaan. Selain itu, tidak semua masalah memiliki urgensi atau dukungan politik yang sama kuat. Oleh karena itu, penetapan agenda dipengaruhi

oleh dinamika kepentingan, baik kepentingan publik, elite politik, maupun institusi terkait.

Kingdon dalam Suganda,dkk (2025:69):

“suatu isu baru akan masuk dalam agenda kebijakan ketika tiga aliran utama bertemu secara bersamaan, yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Aliran masalah berkaitan dengan persoalan yang diidentifikasi dan diakui secara luas oleh publik atau pemerintah sebagai masalah serius. Aliran kebijakan berhubungan dengan adanya alternatif solusi yang layak, sementara aliran politik mencakup situasi politik yang mendukung, seperti dukungan elite politik, arah pemerintahan, atau tekanan dari masyarakat. Ketika ketiga aliran ini bertemu dalam satu momentum, tercipta apa yang disebut *policy window* atau jendela kesempatan bagi isu tersebut untuk masuk ke agenda formal pemerintah”.

3. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Formulasi kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu saat berbagai alternatif solusi dirancang dan dipertimbangkan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi dan masuk ke dalam agenda pemerintah. Pada tahap ini, berbagai aktor seperti pemerintah, birokrasi, akademisi, pakar kebijakan, dan kelompok masyarakat terlibat aktif untuk menyusun opsi-opsi kebijakan yang layak. Penyusunan alternatif ini biasanya didasarkan pada hasil riset, studi komparatif kebijakan di negara lain, kajian ilmiah, konsultasi publik, atau masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Stakeholder Analysis juga menjadi metode penting yang membantu pemangku kebijakan memetakan siapa saja pihak-pihak yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis ini

memberikan gambaran tentang kepentingan, pengaruh, dan potensi resistensi dari masing-masing kelompok, sehingga pemerintah dapat menyiapkan strategi komunikasi atau mitigasi yang tepat.

4. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Adopsi kebijakan (*policy adoption*) merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, yaitu ketika pemerintah secara resmi menetapkan dan memilih alternatif kebijakan yang akan dijalankan untuk mengatasi suatu permasalahan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk alternatif dan telah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diambil keputusan finalnya dalam bentuk regulasi formal. Bentuk regulasi tersebut dapat berupa undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), atau keputusan menteri, tergantung pada lingkup dan kewenangan yang berlaku dalam sistem pemerintahan.

Proses adopsi kebijakan sangat erat kaitannya dengan dinamika politik, di mana kekuatan politik, lobi, negosiasi, serta koalisi antaraktor menjadi faktor penentu apakah suatu kebijakan dapat diadopsi atau tidak. Tidak jarang, meskipun sebuah kebijakan telah teruji secara teknokratis dalam tahap formulasi, tetap memerlukan dukungan politik yang kuat agar dapat diloloskan. Dalam sistem politik demokrasi, misalnya, keputusan pengesahan undang-undang harus melalui proses legislatif yang melibatkan DPR dan pemerintah, sehingga perdebatan, kompromi, dan kepentingan politik sering kali mempengaruhi isi akhir dari kebijakan tersebut.

5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi. Pada fase ini, kebijakan yang sebelumnya berbentuk regulasi atau keputusan formal mulai diterjemahkan ke dalam aksi nyata, melalui serangkaian program, proyek, atau kegiatan operasional yang melibatkan berbagai sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, prosedur birokrasi, dan teknologi pendukung. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana sumber daya ini dikelola secara efektif.

Mazmanian dan Sabatier dalam Suganda,dkk (2025:72):

“keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan beberapa prasyarat penting, yaitu: kejelasan tujuan kebijakan, komitmen dari birokrasi pelaksana, kecukupan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta dukungan politik yang stabil. Tanpa kejelasan tujuan yang dapat diukur, birokrasi pelaksana akan kesulitan menerjemahkan kebijakan ke dalam program kerja yang konkret. Begitu pula, tanpa komitmen birokrasi dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan akan sulit dijalankan secara efektif”.

Di Indonesia, implementasi kebijakan umumnya melibatkan berbagai aktor, mulai dari kementerian di tingkat pusat, lembaga teknis, hingga pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Koordinasi antarlembaga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ada perbedaan prioritas, kepentingan politik, atau ego sektoral yang sering memicu tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses pelaksanaan.

2.1.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan. Seseorang atau pelaku pemerintahan harus menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. Tujuan dari suatu kebijakan dan realisasinya dalam proses pelaksanaan pemerintahan sangat berhubungan. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat serta menciptakan kesejahteraan.

Pengimplementasiannya pemerintahan harus sudah mempersiapkan apa program kan kegiatan seperti apa yang mampu memberikan solusi bagi suatu masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudkan tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Grindle dalam Dewi (2022:120) Dalam hal ini,

“implementasi dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum atau publik. Suatu kebijakan dapat dilihat seberapa manfaat dan dampaknya apabila telah diimplementasikan atau diterapkan terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tindakan lanjutan atau eksekusi setelah proses perencanaan kebijakan”.

Subianto dalam Dewi (2022:122) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi yakni:

- 1) Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
- 2) Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan.
- 3) Didalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurnagkurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak, yakni:
 - 1) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.
 - 2) Target Groups atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini diartikan sebagai target suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Unsur pelaksana (*Implementor*)

Wahab dalam Jumroh dan Pratama (2021:109-110). Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Tachjan dalam Jumroh dan Pratama (2021:110) unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan
3. Target group atau kelompok sasaran.

Terlepas dari seberapa banyak unsur unsur yang ada atau yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka pastinya sangat banyak jumlah dan jenisnya. Unsur itu tidak hanya berada di sisi internal organisasi yang menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berada di sisi eksternal kebijakan. Di kedua sisi tersebut ada banyak unsur yang masing-masing memiliki sub unsur yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa masing-masing unsur, baik yang ada di sisi internal atau sisi eksternal itu saling berinteraksi yang ujungnya memberi pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan publik

Implementasi program tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga factor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat

memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan. Pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen termasuk dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Maka, ketika sebuah kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya yakni mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan kebijakan dan juga melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Adapun berikut terdapat konsep manajemen implementasi kebijakan yang diadopsi dari pemikiran James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert Jr dalam Dewi (2022:123).

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah landasan konseptual yang digunakan untuk menghubungkan teori dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Fungsi utama kerangka berpikir adalah sebagai pedoman dalam menjelaskan hubungan antara variabel atau konsep yang dikaji, sehingga arah analisis menjadi lebih terarah dan ilmiah. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun untuk menjelaskan bagaimana dimensi-dimensi implementasi Kebijakan dapat digunakan untuk menilai mutu efektivitas program rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Sugiyono (2022:88), “Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian, Pernyataan ini menegaskan bahwa kerangka berpikir harus disusun

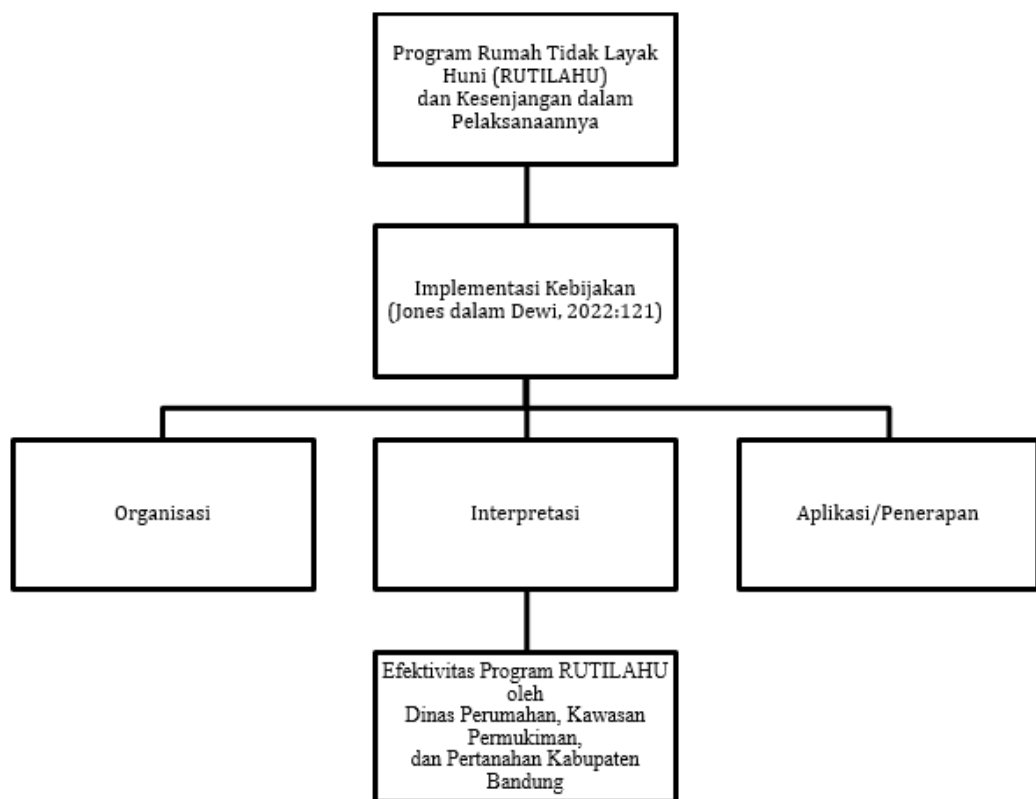
berdasarkan teori yang kredibel dan berfungsi sebagai jembatan antara konsep teoritis dengan realitas empiris.

Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Jones dalam Dewi (2022:121) mengemukakan terdapat beberapa dimensi dalam pelaksanaan pemerintah yang berkaitan erat dengan program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya dan membahas *stakeholder* yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, proses implementasi mencakup aktivitas-aktivitas merujuk pada penempatan suatu program yang berdampak, meliputi 3 tindakan utama dalam implementasi kebijakannya, yakni :

- 1) Interpretasi. Interpretasi disini bertindak dalam memberikan makna atau penafsiran sebuah program atau kebijakan yang dirasa harus ada dan pengimplementasiannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.
- 2) Organisasi atau instansi. Organisasi disini sebagai unit/ tempat menempatkan kebijakan agar dapat diterima.
- 3) Aplikasi. Aplikasi ini berhubungan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan. Sesuai dengan beberapa poin diatas, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab dalam menjalankan kebijakan atau program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok, tetapi juga dalam menyangkut jaringan kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang kemudian akan mempengaruhi perilaku *stakeholder* yang terlibat yang akhirnya akan

memberikan pengaruh baik itu yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effect*).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jones dalam Dewi (2022:121) yang menekankan pentingnya pendekatan organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan dalam pelaksanaan program rutilahu di disperkintan kabupaten bandung. Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa efektivitas program Rutilahu sangat dipengaruhi oleh Organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan dalam pelaksanaannya di lapangan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yang terdiri dari tiga dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi, maka proposisi penelitian pada penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program RUTILAHU di Disperkintan Kabupaten Bandung (Studi Kasus Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang)” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dimensi Organisasi, semakin baik pengorganisasian pelaksana program RUTILAHU, baik dari aspek pembagian tugas, koordinasi antar lembaga, maupun ketersediaan sumber daya, maka semakin efektif implementasi kebijakan program RUTILAHU di Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang.
2. Dimensi Interpretasi, semakin jelas pemahaman dan penafsiran pelaksana kebijakan terhadap tujuan, prosedur, dan ketentuan program RUTILAHU, maka semakin tepat pelaksanaan program RUTILAHU di Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang.
3. Dimensi Aplikasi, semakin optimal penerapan kebijakan program RUTILAHU sesuai pedoman, mekanisme, dan kebutuhan masyarakat, maka semakin baik hasil implementasi program RUTILAHU di Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang.